

ABSTRAK

Penelitian yang dijadikan bahan Disertasi dengan judul Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang dari Bupati kepada Camat Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Kependudukan, sebagai upaya untuk memecahkan masalah, yaitu belum terlaksananya secara keseluruhan implementasi kebijakan tentang pendelegasian wewenang yang disebabkan semua instansi yang terlibat belum berperan sepenuhnya bermitra dengan Camat.

Melalui pendekatan kualitatif dalam bentuk kasus, peneliti sebagai instrument penelitian dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan dan meverifikasi setiap data informasi yang masuk. Sumber data dilengkapi dengan dokumentasi, sedangkan cara pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Setelah melalui proses triangulasi data selanjutnya diklasifikasi, dideskripsikan dan dieksplanasi dengan berbagai pendapat para pakar dan teori-teori ilmu sosial, ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain isi dan konteks implementasi kebijakan pendelegasian wewenang bidang pengembangan otonomi daerah dan bidang kependudukan, sinkronisasi dan integrasi juga sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Tindakan yang disarankan bahwa Implementasi Kebijakan pendelegasian perlu ditindak lanjuti secara jelas berupa langkah-langkah kerja atau tata cara pelaksanaan secara teknis yang dituangkan dalam Peraturan Bupati lebih lanjut serta didukung dengan kecukupan personil, anggaran, sarana dan prasarana dan menjadikan kecamatan bagian integral dari unit terkait.

ABSTRACT

This research, as material of Dissertation with title The Implementation of Delegation of Authority Policy From Regent for Sub Distric Head on Regional Autonomy Development and Demography Sector, is an effort to solve the problem that is the implementation of authority of delegation policy has not been conducted completely because all institutions involved have not played as partner of the head sub district.

With qualitative approach in a case study, the writer collects, investigates, analyze, interprets and verify each information data that obtain as the research instrument. The data source provides with documentation and the data collecting covers observation, deeply interview and documentation study. After the process of triangulation, the data is classified, described and explained with various opinions of the theorists and theories of social, administration and governmental sciences to conclude the answer of the research problem.

The research result showed that another the implementation of authority of delegation policy on regional autonomy development and demography sector, harmony and integratet as too domain to policy implementation efffetively. It suggests that the content and context of the implementation of authority of delegation policy will be clearly followed up with working steps or technical implementation patterns in deeply regulation of region head that supported with appropriate personnel, budget, facility and instrument, and made the subdistrict as integral part of related institution.

